

KRISIS EKONOMI 1998: PENGALAMAN INDONESIA

Arko Pujadi

PENDAHULUAN

- Krisis ekonomi 1997 bermula dari depresiasi bath akibat keputusan Thailand mengambangkan nilai mata uangnya pada 2 Juli 1997. Krisis itu kemudian menyebar ke berbagai negara Asia, termasuk Indonesia.
- Bagi Indonesia, krisis tersebut merupakan konsekuensi logis dari keterbukaan perekonomiannya, yang membuatnya menjadi tidak imun terhadap pengaruh faktor eksternal.
- Namun, tak seorang pun mengira bahwa krisis yang semula hanya terjadi di sektor moneter tersebut, dapat berkembang menjadi krisis berdimensi jamak yang mengguncang berbagai aspek kehidupan bangsa.
- Hanya dalam waktu yang relatif singkat, krisis itu beserta berbagai peristiwa sosial dan politik yang mengiringinya, berhasil menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat perhatian dunia.
- Indonesia menjadi terkenal, bukan hanya oleh pergerakan reformasinya yang menjadi model pergerakan serupa di beberapa negara Asia dan Afrika, tetapi terutama oleh berbagai tragedi sosial dan kemanusiaan yang mencoreng wajahnya di forum pergaulan dunia.

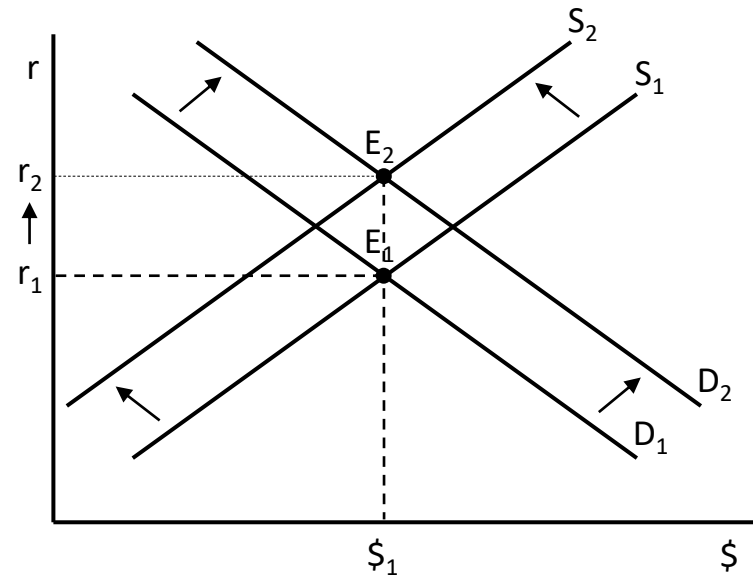
MEKANISME KRISIS

Gambar 1.1.

Mekanisme Pasar US\$

Dari sisi permintaan (D), terjadi lonjakan akibat tindakan arbitrase para spekulan, serta panik debitur swasta yang memborong US\$ untuk membayar hutang LN mereka yang menjelang jatuh tempo (jumlahnya \pm US\$10 miliar dan tidak di-*hedging*).

Dari sisi penawaran (S), terjadi penurunan akibat pelarian modal ke luar negeri (*capital outflow*). Investor asing menarik kembali investasi mereka (terutama investasi portofolio), dan orang-orang kaya Indonesia mengamankan kekayaannya di luar negeri.



Tabel 1.1.

Kurs Tengah US\$, Juli 1997 – Juni 1998

Kurs (r) mulai beranjak naik dari Rp 2.452 pada 7/7 menjadi 5.750 pada 15/12. Pada 14/8, rupiah diambangkan dan 9/10 pemerintah meminta bantuan IMF, tapi rupiah terus terdepresiasi.

Pada 22/1, kurs sempat menyentuh Rp 16.500 dipicu isu *senering*, walau akhirnya ditutup pada Rp 12.150.

Pada 11/2, rupiah menguat menjadi Rp 6.200, terkatrol oleh rencana penerapan CBS, tapi setelah IMF dan AS menyatakan tidak setuju, rupiah kembali rontok ke tingkat Rp 10.500.

Tanggal	Kurs Tengah (Rp)
7 Juli 1997	2.452
15 Desember 1997	5.750
22 Januari 1998	12.150
5 Maret 1998	10.500
18 Juni 1998	16.650

Sumber: Kompas, 22 Oktober 1998

Setelah itu, rupiah terus terpuruk dipicu oleh peristiwa Trisakti, penjarahan massal, dan pengunduran diri Presiden Suharto, hingga menyentuh tingkat terendah Rp 16.650 pada 18 Juni 1998.

MEKANISME KRISIS

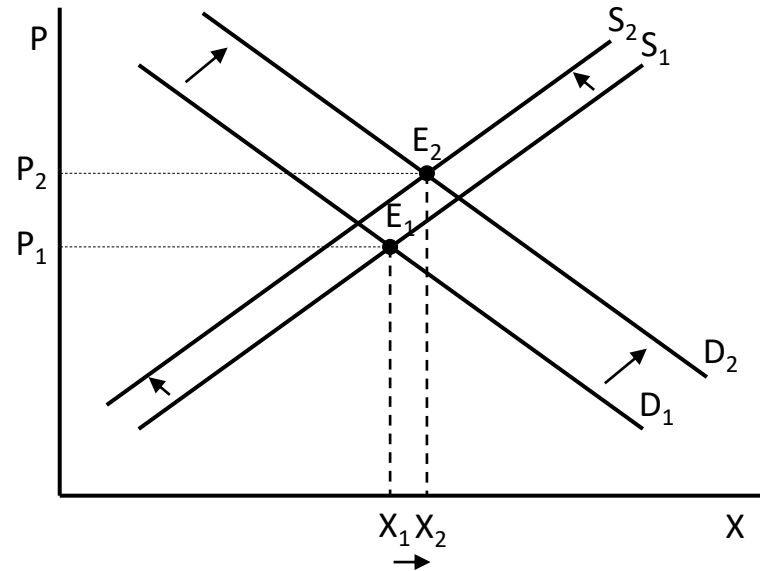
Gambar 1.2.

Mekanisme Pasar Ekspor

Dari sisi permintaan (D), terjadi peningkatan akibat depresiasi rupiah yang membuat produk Indonesia di pasar dunia menjadi relatif lebih murah.

Dari sisi penawaran (S), terjadi hambatan akibat krisis kepercayaan LN yang membuat L/C Indonesia ditolak.

Menurut catatan BPS, selama Januari hingga Agustus 1998, nilai ekspor nonmigas (X) sebesar US\$ 27.874,8 juta, hanya meningkat 3,11% dibanding periode sama tahun 1997 yang sebesar US\$ 28.741,71 juta (peningkatan ekspor menjadi tidak maksimal).



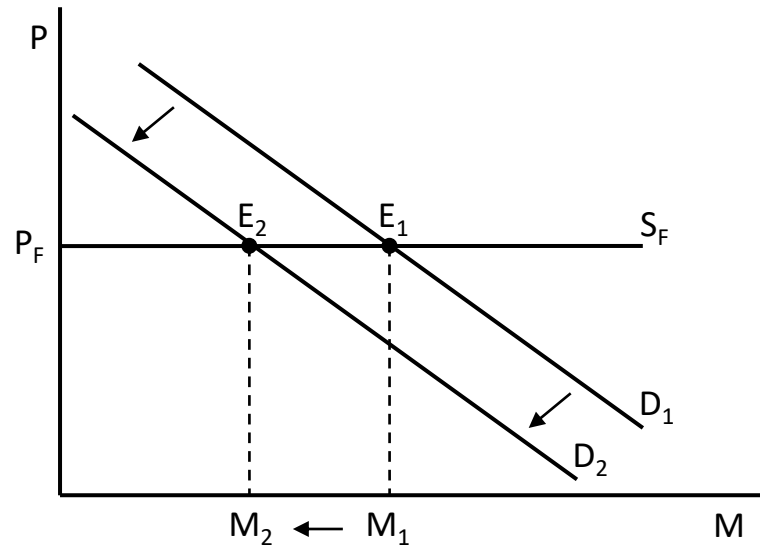
Gambar 1.3.

Mekanisme Pasar Impor

Dari sisi permintaan (D), terjadi penurunan akibat depresiasi rupiah yang membuat produk impor menjadi relatif lebih mahal.

Dari sisi penawaran (S), sebagai negara kecil di pasar dunia, Indonesia menghadapi penawaran yang elastis sempurna pada harga dunia.

Menurut catatan BPS, selama Januari hingga Agustus 1998, nilai impor nonmigas (M) sebesar US\$ 16.062,4 juta, menurun 37,52% dibanding periode sama tahun 1997 yang sebesar US\$ 25.708,5 juta.



MEKANISME KRISIS

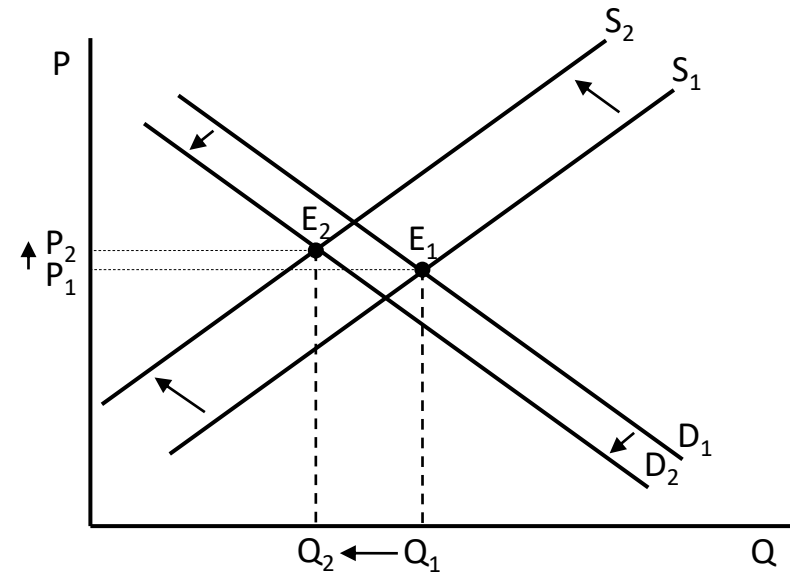
Gambar 1.4.

Mekanisme Pasar Barang dan Jasa

Dari sisi penawaran (S), terjadi penurunan akibat kenaikan biaya produksi yang ditanggung produsen (kenaikan harga input impor dan beban hutang LN).

Dari sisi permintaan (D), terjadi penurunan akibat PHK dan penurunan daya beli masyarakat.

Menurut catatan BPS, PDB anjlok dari Rp 434.095,5 miliar pada 1997 menjadi Rp 374.718,8 miliar pada 1998, sehingga pendapatan per kapita turun dari US\$ 1.055 menjadi US\$ 436. Sepanjang periode itu, pertumbuhan ekonomi minus 13,68% dan inflasi 77,63%.



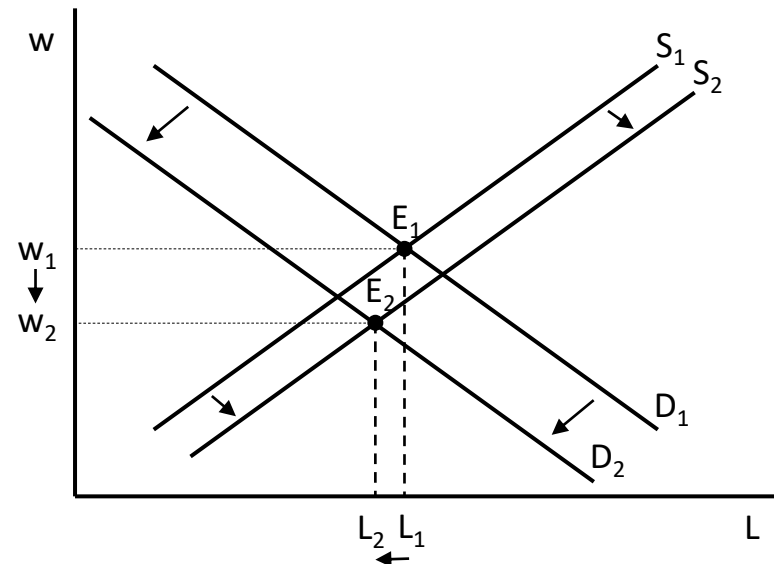
Gambar 1.5.

Mekanisme Pasar Tenaga Kerja

Dari sisi permintaan (D), terjadi penurunan akibat pengurangan produksi barang dan jasa.

Dari sisi penawaran (S), terjadi peningkatan akibat tambahan tenaga kerja baru.

Menurut catatan BPS, tingkat pengangguran yang dihitung dari jumlah angkatan kerja, meningkat dari 7,5% pada 1997 menjadi 14,5% pada September 1998. Sementara, jumlah penduduk miskin bertambah dari 22,5 juta jiwa pada 1996 menjadi 78,4 juta jiwa pada Juni 1998.



KEBIJAKAN EKONOMI

KEBIJAKAN DALAM BIDANG NERACA PEMBAYARAN

- Setelah beberapa kali gagal mengendalikan kurs US\$ melalui penetapan batas intervensi (*band intervention*), pada 14 Agustus 1997, pemerintah memutuskan untuk meninggalkan sistem kurs mengambang terkendali (*manage floating exchange rate*) dan beralih ke sistem kurs bebas (*floating exchange rate*). Kebijakan ini melepaskan Bank Sentral dari kewajiban melakukan operasi pasar terbuka, mengingat dengan keterbatasan cadangan devisa yang dimilikinya, Bank Sentral tak mungkin mampu mengendalikan pergerakan kurs di pasar valuta asing.
- Untuk mengurangi hambatan ekspor yang bersumber dari krisis kepercayaan luar negeri, pemerintah meluncurkan skema penjaminan kredit untuk keperluan pembukaan L/C. Sementara, Lembaga Pembiayaan Ekspor (LPE) dibentuk untuk membantu eksportir yang mengalami kendala dalam pembiayaan ekspor.
- Untuk mengambat pelarian modal ke luar negeri (*capital outflow*), pemerintah menerapkan kebijakan monitoring devisa. Sementara, panik debitur swasta diredam dengan menyelenggarakan program Indonesia Debt Restructuring Agency (INDRA) dan mendorong upaya penjadwalan kembali hutang luar negeri swasta.

KEBIJAKAN EKONOMI

KEBIJAKAN FISKAL

- Krisis ekonomi membuat pendapatan pemerintah dari sumber dalam negeri (pajak) menjadi sangat terbatas. Pemerintah mencoba menutupi kekurangannya dengan privatisasi BUMN, tetapi akhirnya mengundang campur tangan IMF dan Bank Dunia.
- Mengingat pendapat IMF masih menjadi faktor penting bagi pelaku ekonomi, maka di samping pinjamannya yang sebesar US\$ 43 miliar, kehadiran IMF diharapkan dapat ikut memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi untuk menanamkan kembali modal mereka di Indonesia.
- Dari sisi pengeluaran terjadi pembengkakan, terutama untuk membiayai subsidi kebutuhan pokok, program jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan program restrukturisasi perbankan.
- Pemerintah mencoba melakukan penghematan dengan menjadwalkan kembali hutang luar negerinya, tetapi keinginan pemerintah untuk menghapus subsidi BBM dan listrik, mendapat reaksi keras dari masyarakat, sehingga direvisi dan hanya dikurangi.
- Alhasil, untuk pertama kali pasca Orde Baru, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal defisit dalam APBN 1998/1999. Angkanya mencapai 8,5% dari PDB.

KEBIJAKAN EKONOMI

KEBIJAKAN MONETER

- Kebijakan moneter yang diselenggarakan Bank Sentral bersifat kontraktif untuk mengurangi jumlah uang beredar melalui kenaikan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Menurut catatan Bank Indonesia, tingkat bunga SBI mencapai tingkat tertinggi 70,6% pada 2 September 1998.
- Ada dua target yang ingin dicapai Bank Sentral melalui kebijakan moneter yang kontraktif, yaitu (i) untuk mengurangi tekanan inflasi melalui penurunan jumlah uang beredar, dan (ii) untuk menarik kembali modal yang diparkir di luar negeri melalui kenaikan tingkat bunga.
- Menurut catatan Bank Indonesia, kebijakan tersebut efektif dalam mengurangi jumlah uang beredar. Per September 1998, pertumbuhan tahunan uang kartal riil minus 1,7%, sedangkan M1 (uang kartal dan uang giral) dan M2 (M1 plus deposito), masing-masing tumbuh minus 15,1% dan minus 8,3%.
- Namun, tingginya tingkat bunga ternyata tidak mampu menandingi kuatnya krisis kepercayaan yang melanda pelaku ekonomi. Sehingga, kebijakan tersebut gagal dalam menarik kembali modal yang diparkir di luar negeri. Padahal tingkat bunga yang tinggi terlanjur menimbulkan tekanan yang semakin berat bagi produsen di sektor riil.

PERAN IMF DAN BANK DUNIA

Banyak kritik dilontarkan ekonom terhadap peran IMF dalam manajemen krisis ekonomi 1997 di Indonesia. Mereka menuding lembaga ini terlalu cepat ingin menyelesaikan krisis melalui penerapan sistem ekonomi pasar, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan politiknya. Sejumlah kebijakan hasil saran IMF yang oleh para pengkritiknya dinilai sebagai kesalahan antara lain:

- Kebijakan mengambangkan rupiah pada 14 Agustus 1997
Kebijakan ini dinilai telah menjerumuskan rupiah di awal krisis, karena mengakibatkan serangan spekulasi terhadap Indonesia menjadi semakin meningkat.
- Kebijakan melikuidasi 16 bank pada 1 November 1997
Kebijakan ini menurut pengkritiknya, merupakan awal dari kehancuran kepercayaan pelaku ekonomi terhadap industri perbankan Indonesia.
- Kebijakan moneter kontraktif dengan tingkat bunga tinggi
Kebijakan ini dituduh memicu panik di kalangan pelaku ekonomi sehingga mendorong mereka melakukan *capital outflow*. Sementara, tingkat bunga tinggi dituding sebagai biang keladi dari kelesuan di sektor riil.
- Kebijakan fiskal kontraktif dengan membatasi pengeluaran subsidi
Menurut pengkritiknya, kontraksi fiskal pada kondisi krisis justru semakin memperdalam krisis. Kebijakan tersebut juga disebut tidak tepat karena penyebab krisis bukan berasal dari defisit fiskal.

PERAN IMF DAN BANK DUNIA

- Sementara itu, program jaring pengaman sosial (JPS) yang diprakarsai Bank Dunia, dikritik Jellinek (Kompas, 5 Februari 1998) sebagai merusak semangat inovasi, kreasi, dan kebersamaan yang telah tumbuh di antara warga masyarakat selama berlangsungnya krisis.
- Dalam penelitiannya, antropolog dan sosiolog asal Australia itu menemukan bahwa krisis ekonomi ternyata membuat warga masyarakat di kota dan desa menjadi lebih giat berusaha. Sementara kehadiran program JPS menimbulkan iri hati dan perpecahan di antara warga masyarakat akibat distribusinya yang kadang tidak adil dan tidak merata.